



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : L. Amrih Jinangkung
Jabatan : Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi,
Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Damos Dumoli Agusman
Jabatan : Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Damos Dumoli Agusman

Jakarta, Januari 2019

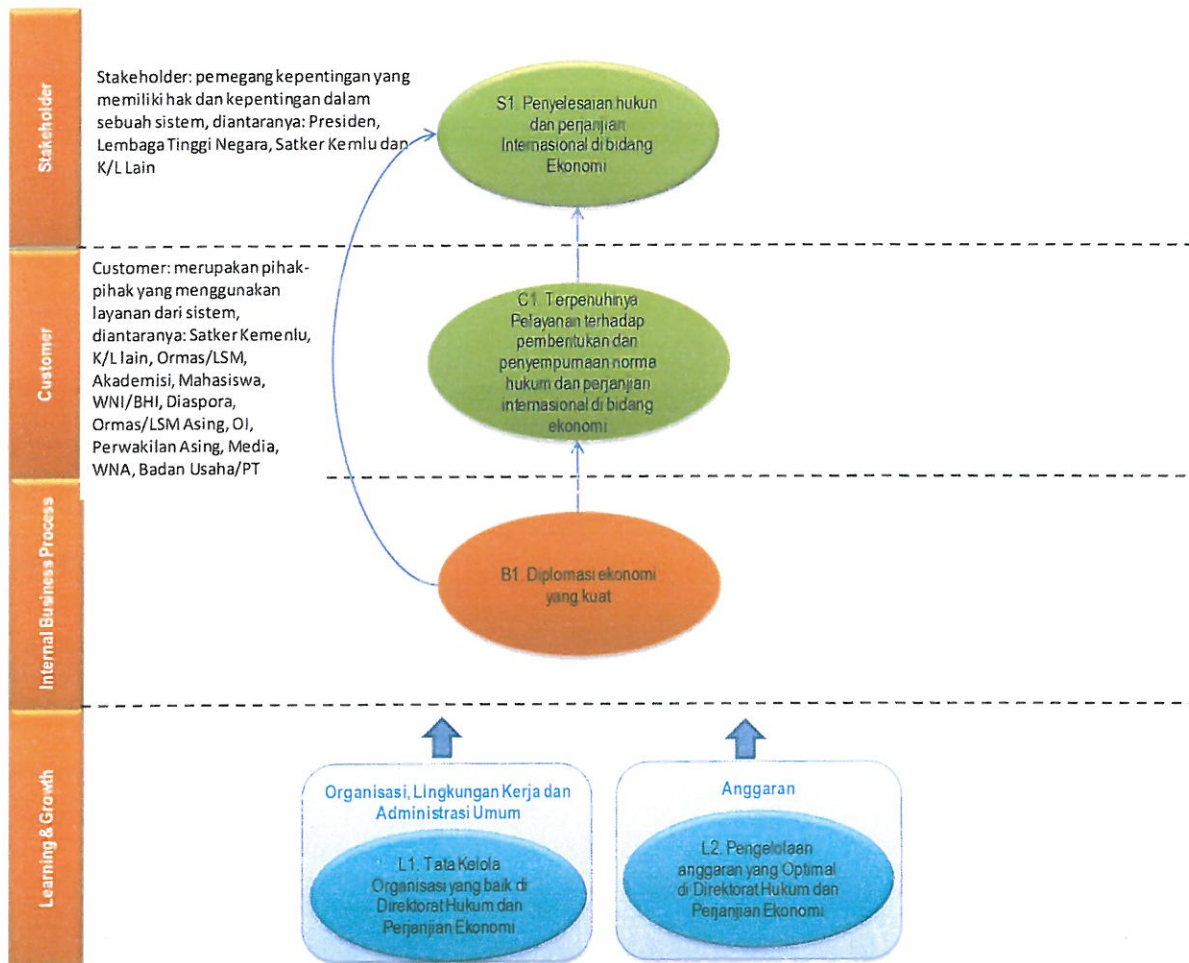
Pihak Pertama,

L. Amrih Jinangkung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DIREKTUR HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI



Peta Strategi Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi KEMENTERIAN LUAR NEGERI



| Kode SS | Sasaran Strategis | Kode IKU | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2019 |
|--------------------------------|---|----------|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Stakeholder Perspective | | | | |
| S1 | Penyelesaian hukum dan perjanjian Internasional di bidang ekonomi | S1.1 | Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan | 100%*) |
| Customer Perspective | | | | |
| C1 | Terpenuhinya pelayanan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi | C1.1 | Persentase pelayanan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomis sesuai dengan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> | 100%**) |

| Kode SS | Sasaran Strategis | Kode IKU | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2019 |
|--|--|----------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Internal Business Process Perspective | | | | |
| B1 | Diplomasi ekonomi yang kuat | B1.1 | Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang disampaikan dalam forum Internasional | 100%**) |
| | | B1.2 | Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi | 100%*) |
| Learning & Growth Perspective | | | | |
| L1 | Tata Kelola Organisasi yang baik di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | L1.1 | Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | BB (77) |
| L2 | Pengelolaan Anggaran yang Optimal di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | L2.1 | Persentase realisasi anggaran di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | 100% |

Keterangan : *) Persentase berdasarkan IKU Mistar

**) Persentase berdasarkan Jumlah Pelayanan yang diberikan

| No. | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
|---|--|----------------------|
| 1 | Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Ekonomi | 5.311.743.000 |
| Pagu Anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi 2019 | | 5.311.743.000 |

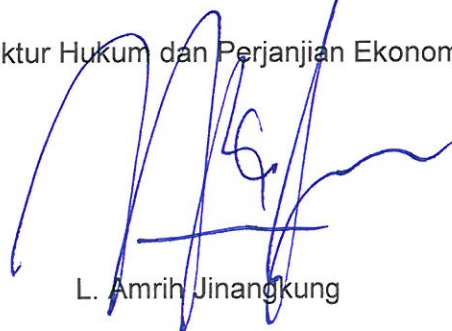
Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional



Damos Dumoli Agusman

Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi



L. Amrih Jinangkung

| | |
|------------------------------------|--|
| Perspektif: | Stakeholder: pemegang kepentingan yang memiliki hak dan kepentingan dalam sebuah sistem, di antaranya: Presiden, Lembaga Tinggi Negara, Satker Kemlu dan K/L Lain |
| Sasaran Strategis: | Penyelesaian hukum dan perjanjian Internasional di bidang Ekonomi |
| Deskripsi Sasaran Strategis: | <p>Penyelesaian adalah hal keadaan dimana tahapan dalam hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan</p> <p>Perjanjian Internasional di bidang ekonomi adalah sebuah perjanjian ekonomi yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara.</p> |
| Indikator Kinerja Utama: | IKU-1 Persentase kemajuan hukum dan perjanjian Internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan |
| Deskripsi Indikator Kinerja Utama: | <p>Definisi:</p> <p>Kemajuan adalah perkembangan dari titik awal ke titik target pada mistar perjanjian internasional di bidang ekonomi.</p> <p>Titik awal adalah sebuah titik tahapan dalam mistar perjanjian yang ditentukan sesuai dengan perjanjian internasional yang akan diselesaikan pada tahun berjalan.</p> <p>Titik target adalah sebuah titik capaian pada mistar dari perjanjian internasional yang akan diselesaikan.</p> <p>Jarak antara titik awal ke titik target adalah 100%.</p> <p>Perjanjian internasional di bidang ekonomi adalah sebuah perjanjian ekonomi yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara.</p> <p>Ruang Lingkup: Termasuk dengan pengakhiran kesepakatan di bidang Ekonomi</p> <p>Mistar Perjanjian Internasional di Bidang Ekonomi adalah alat ukur dengan skala 0 s.d. 245 yang terdiri dari tahapan:</p> <p>The scale is divided into eight main sections:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. PERAJUKAN (0-30): <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan rencana pembuatan perjanjian internasional ke Negara mitra atau ke K/L/D (3) 2. Konsultasi dan koordinasi rencana pembuatan PI dari K/L/D pemrakarsa untuk mendapatkan persetujuan pemimpinan politik, yuridis dan teknis lainnya (5) 3. Penerimaan dan pengesahan draft PI oleh perjanjian internasional ke K/L/D atau ke negara mitra (3) 4. Perumusan pasal (15) 5. Perumusan Perjanjian Delit (10) 6. Perumusan rencana pelaksanaan perjanjian (5) 7. Pembahasan draft/counter draft perjanjian internasional (15) 8. Penyempurnaan draft/counter draft PI hasil pembahasan (5) II. PERUNDINGAN (65-135): <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dengan perwakilan Negara mitra atau perwakilan RI di luar negeri mengenai hal-hal yang terkait persiapan perundingan (10) 2. Menyampaikan seruan Delit, dan pedoman Delit ke K/L/D atau perwakilan RI di luar negeri (5) 3. Penerbitan Credentials/Surat Kepercayaan (10) 4. Merundingkan dan menyampaikan solusi alternative (20) 5. Pengambilan keputusan/bebijakan (20) III. PERUMUSAN NASKAH (140-155): <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Agreed Minutes/Minutes of Meeting/Record of Discussion/Summary Record hasil perundingan (15) 2. Merumuskan naskah akhir PI (10) IV. PENERIMAAN NASKAH (155-165): <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembubuhan paraf pada naskah akhir PI (5) 2. Pembuatan dokumen laporan penerimaan naskah (5) V. PENANDATANGAN PERJANJIAN (165-185): <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pasakat penandatanganan (3) 2. Pembuatan Full Powers (5) 3. Penyapan naskah dalam kertas perjanjian dan sampul (5) 4. Penandatanganan naskah oleh kedua belah pihak (5) 5. Sealing naskah (5) VI. RATIFIKASI (185-225): <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan terjemahan Perjanjian (5) 2. Pembuatan ornamen Perjanjian (5) 3. Pembahasan linciham RUU/RPP (10) 4. Penyempurnaan surat dari K/L/D ke Kemlu (3) 5. Penyempurnaan Surat Pengantar dari Kemlu ke Presiden (3) 6. Pembahasan antara Presiden dan DPR (15) VII. PERTUKARAN RATIFIKASI (225-240): <ol style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi kepada Negara mitra/penyampaian instrument of ratification/accesion ke lembaga depository (5) VIII. PEMBERLAKUAN (240-245) |

| | |
|--|--|
| Formula: | |
| Realisasi kemajuan | X100% |
| (Titik target - Titik awal) | |
| Tujuan: | |
| Untuk mengetahui kemajuan perjanjian Internasional di bidang Ekonomi yang telah diselesaikan | |
| Satuan Pengukuran : | Persentase |
| Tingkat Kendali IKU : | <input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low |
| Tingkat Validitas IKU : | <input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity |
| Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : | Semua Subdirektorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi |
| Unit/Pihak Penyedia Data : | Semua Subdirektorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi |
| Sumber Data : | Laporan kemajuan hukum dan perjanjian ekonomi |
| Jenis Cascading IKU: | <input type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input checked="" type="checkbox"/> Non-Cascading |
| Metode Cascading : | <input type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect |
| Jenis Konsolidasi Periode : | <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value |
| Jenis Konsolidasi Lokasi : | <input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw data |
| Polarisasi Indikator Kinerja : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan : | <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |

Tabel Data :

| Periode Pelaporan | 2017 | | 2018 | | 2019 |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% |
| TRIWULAN I | N/A | N/A | 25% | 24.49% | 25% |
| TRIWULAN II | N/A | N/A | 50% | 48.98% | 50% |
| TRIWULAN III | N/A | N/A | 75% | 69.68% | 75% |
| TRIWULAN IV | N/A | N/A | 100% | 99.18% | 100% |

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI**

C1

Perspektif: *Customer: merupakan pihak-pihak yang menggunakan layanan dari sistem, di antaranya: Satker Kemenlu, K/L lain, Ormas/ LSM, Akademisi, Mahasiswa, WNI/ BHI, Diaspora, Ormas/ LSM Asing, OI, Perwakilan Asing, Media, WNA, Badan Usaha/ PT*

Sasaran Strategis: Terpenuhinya pelayanan terhadap pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi

Deskripsi Sasaran Strategis:
Pelayanan adalah usaha untuk melayani.
Pembentukan adalah suatu proses untuk membuat.
Penyempurnaan adalah suatu proses untuk menyempurnakan/menambahkan agar lebih baik lagi.
Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.
Perjanjian Internasional di bidang ekonomi adalah sebuah perjanjian ekonomi yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara.

Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase pelayanan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)*

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:
Definisi:
Pendapat hukum di bidang ekonomi adalah saran atau masukan yang diberikan kepada stakeholders terkait norma-norma hukum perdagangan, investasi, keuangan, industri, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Stakeholders adalah pemegang kepentingan yang memiliki hak dan kepentingan dalam sebuah sistem, di antaranya: (Presiden, Lembaga Tinggi Negara, Satker Kemlu dan K/L Lain).
Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan antara penyedia jasa dengan pelanggan terkait dengan tingkat (mutu) layanan yang diberikan sesuai dengan SOP.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah pendapat hukum yang disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah permintaan pendapat hukum yang disampaikan oleh stakeholders}} \times 100\%$$

Tujuan:
 Untuk mengukur pendapat hukum di bidang ekonomi yang disampaikan kepada stakeholders sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IKU : () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU : () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Semua Sub Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Unit/Pihak Penyedia Data : Semua Sub Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Sumber Data : Laporan

Jenis Cascading IKU: () Cascading Peta () Cascading Non peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct () Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : () Sum (X) Average () Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

| Periode Pelaporan | 2017 | | 2018 | | 2019 |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% |
| TRIWULAN I | N/A | N/A | 25% | 25% | 25% |
| TRIWULAN II | N/A | N/A | 50% | 50% | 50% |
| TRIWULAN III | N/A | N/A | 75% | 75% | 75% |
| TRIWULAN IV | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% |

| | |
|------------------------------------|--|
| Perspektif: | Business Process |
| Sasaran Strategis: | Diplomasi ekonomi yang kuat |
| Deskripsi Sasaran Strategis: | Diplomasi Ekonomi: adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik. Kuat adalah mempunyai keunggulan untuk bersaing dengan negara lain. |
| Indikator Kinerja Utama: | IKU-1 Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang disampaikan dalam forum internasional |
| Deskripsi Indikator Kinerja Utama: | Definisi: Pendapat Hukum adalah segala posisi, prakarsa, dan rekomendasi hukum yang diusulkan oleh Indonesia dalam setiap forum perundingan internasional di bidang ekonomi. Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi mencakup antara lain: perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik Batas waktu: Jumlah kesepakatan yang disepakati selama satu periode anggaran. Formula: Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi _____ x100% Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi Tujuan: Untuk mengetahui jumlah kesepakatan yang dihasilkan dari diplomasi bidang ekonomi |
| Satuan Pengukuran : | Jumlah |
| Tingkat Kendali IKU : | () High (X) Moderate () Low |
| Tingkat Validitas IKU : | () Exact (X) Proxy () Activity |
| Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : | Subdirektorat Perdagangan dan Investasi |
| Unit/Pihak Penyedia Data : | Satker Eselon II |
| Sumber Data : | Kesepakatan perjanjian di bidang ekonomi |
| Jenis Cascading IKU: | (X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading |
| Metode Cascading : | () Direct (X) Indirect |
| Jenis Konsolidasi Periode : | () Sum () Average (X) Take Last Known Value |
| Jenis Konsolidasi Lokasi : | () Sum () Average () Raw data |
| Polarisasi Indikator Kinerja : | (X) Maximize () Minimize () Stabilize |
| Periode Pelaporan : | () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan |

Tabel Data :

| Periode Pelaporan | 2017 | | 2018 | | 2019 |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% |
| TRIWULAN I | N/A | N/A | 25% | 25% | 25% |
| TRIWULAN II | N/A | N/A | 50% | 50% | 50% |
| TRIWULAN III | N/A | N/A | 75% | 75% | 75% |
| TRIWULAN IV | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% |

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:

Kemajuan Perundingan adalah perkembangan perundingan dari titik awal ke titik target pada perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi.

Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi : Perjanjian secara bilateral, regional atau multilateral di bidang perdagangan bebas dan investasi yang sedang dirundingkan.

"MISTAR" TAHAPAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DAN INVESTASI

1. Fase 1/0: Studi mengenai prospek pembuatan draft perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA/PTA) dan perjanjian investasi (PANI) (12)
2. Konsolidasi dan koordinasi rencana pembuatan draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dengan K/L/D, akademisi serta pihak terkait lainnya guna mempertahankan keseimbangan draft, yuridis dan teknis hukum (3)
3. Riset yuridis hukum terkait substansi provisions yang relevan untuk diupload dalam draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
4. Riset yuridis dan teknis kasus-kasus yang relevan dengan ketentuan dispute settlement dalam draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
5. Persiapan bahan kapal induk untuk koordinasi penyusunan acuan paper Pemri dalam perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
6. Pelaksanaan rapat (track) untuk penyusunan acuan paper Pemri dalam perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
7. Penyusunan acuan paper Pemri untuk perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
8. Perundingan dengan pihak mitra untuk membahas acuan paper FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
9. Finalisasi kesepakatan para pihak atas Drafting Paper untuk perundingan FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
10. Penyusunan laporan interim atas hasil drafting paper yang dibagikan untuk perundingan FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
11. Penyusunan draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM berdasarkan kesepakatan dalam Drafting Paper (3)
12. Rapat internan untuk koordinasi dan pemastian tanggapan atas draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
13. Finalisasi penyusunan draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
14. Penyusunan final draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM kepada pihak mitra (3)
15. Penyusunan Pre-Deal (Poster) untuk persiapan perundingan FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
16. Pelaksanaan perundingan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dengan pihak mitra perjanjian (3)
17. Penyusunan laporan perundingan (summary/ discussion) perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dengan pihak mitra perjanjian (3)
18. Pelaksanaan Rapat internan untuk koordinasi dan pemastian tanggapan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
19. Penyusunan counterdraft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM kepada pihak mitra perjanjian (3)
20. Pelaksanaan rapat interim atau dengan mitra untuk membahas tanggapan atas counterdraft FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
21. Penyusunan Paper untuk perundingan lanjutan FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
22. Pelaksanaan perundingan lanjutan pembahasan/ finalisasi perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
23. Penyusunan laporan (summary/ discussion) perundingan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
24. Pelaksanaan rapat internan untuk koordinasi dan pemastian tanggapan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
25. Penentuan tanggal Penandatanganan draft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
26. Penyusunan counterdraft perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM untuk finalisasi perundingan (3)
27. Perundingan final untuk perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dan penandatanganan final draft akhir (3)
28. Penandatanganan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dan penandatanganan (3)
29. Pertemuan legal binding untuk mengkonfirmasi hasil perundingan FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
30. Pertemuan legal binding untuk bahasa perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
31. Penandatanganan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dalam bahasa Indonesia (3)
32. Penandatanganan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dalam bahasa Inggris (3)
33. Penandatanganan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM dalam bahasa Inggris (3)
34. Penyusunan dokumen administrasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk proses ratifikasi perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
35. Pembahasan dengan DPR/ DPRD mengenai proses ratifikasi FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
36. Finalisasi dokumen hukum kesepakatan FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
37. Ratifikasi perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
38. Penandatanganan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
39. Penandatanganan perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM (3)
40. Monitoring implementasi perjanjian FTA/CEPA/PTA dan PAM

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah kemajuan perundingan di bidang ekonomi yang disampaikan}}{\text{Jumlah perjanjian perdagangan bebas dan investasi yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur pendapat hukum di bidang ekonomi yang disampaikan dalam forum Internasional

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

() High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU :

() Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Semua Subdirektorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Unit/Pihak Penyedia Data :

Semua Subdirektorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Sumber Data :

Laporan kemajuan hukum dan perjanjian

Jenis Cascading IKU:

() Cascading Peta () Cascading Non peta (X) Non-Cascading

Metode Cascading :

() Direct () Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

() Sum (X) Average () Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

(X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data :

| Periode Pelaporan | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% |
| TRIWULAN I | N/A | N/A | 25% | 24,49% | 25% | 25% |
| TRIWULAN II | N/A | N/A | 50% | 48,98% | 50% | 50% |
| TRIWULAN III | N/A | N/A | 75% | 73,47% | 75% | 75% |
| TRIWULAN IV | N/A | N/A | 100% | 99,18% | 100% | 100% |

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI**

L1

| | |
|---|---|
| Perspektif: | <i>Learning and Growth</i> |
| Sasaran Strategis: | Tata Kelola Organisasi yang baik di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi |
| Deskripsi Sasaran Strategis: | <p>Definisi: Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword: prosedural)</p> |
| Indikator Kinerja Utama: | IKU-1 Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi |
| Deskripsi Indikator Kinerja Utama: | <p>Definisi: Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamankan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.</p> <p>Formula: Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional oleh Inspektorat Jenderal</p> <p>Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Evaluasi di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi telah diimplementasikan oleh para pegawai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.</p> |
| Satuan Pengukuran : | Nilai |
| Tingkat Kendali IKU : | <input type="checkbox"/> High <input type="checkbox"/> Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Low |
| Tingkat Validitas IKU : | <input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity |
| Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : | Semua Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha |
| Unit/Pihak Penyedia Data : | Inspektorat Jenderal |
| Sumber Data : | Laporan Hasil AKIP oleh Inspektorat Jenderal |
| Jenis Cascading IKU: | <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading |
| Metode Cascading : | <input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect |
| Jenis Konsolidasi Periode : | <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value |
| Jenis Konsolidasi Lokasi : | <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data |
| Polarisasi Indikator Kinerja : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan : | <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan |
| Konversi 120 : | <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak |

Tabel Data :

| Periode Pelaporan | 2017 | | 2018 | | 2019 |
|-------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | N/A | N/A | 77 (BB) | 76.05 | 77 (BB) |
| TRIWULAN I | N/A | N/A | - | - | - |
| TRIWULAN II | N/A | N/A | - | - | - |
| TRIWULAN III | N/A | N/A | - | - | - |
| TRIWULAN IV | N/A | N/A | 77 (BB) | 76.05 | 77 (BB) |

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI**

L2

| | |
|---|---|
| Perspektif: | <i>Learning and Growth</i> |
| Sasaran Strategis: | Pengelolaan Anggaran yang Optimal di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi |
| Deskripsi Sasaran Strategis: | <p>Definisi: Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. Optimal berarti paling baik dan tertinggi</p> <p>Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.</p> |
| Indikator Kinerja Utama: | IKU-1 Persentase realisasi anggaran di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi |
| Deskripsi Indikator Kinerja Utama: | <p>Definisi: Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Kemenlu.</p> <p>Batasan waktu: 1 tahun anggaran</p> <p>Formula: $\text{(Realisasi Anggaran/Target Anggaran) x 100\%}$</p> <p>Tujuan: untuk mengukur seberapa jauh anggaran Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi digunakan secara optimal untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.</p> |
| Satuan Pengukuran : | Persentase |
| Tingkat Kendali IKU : | <input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low |
| Tingkat Validitas IKU : | <input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity |
| Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : | Subbagian Tata Usaha |
| Unit/Pihak Penyedia Data : | Semua Subdirektorat di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi |
| Sumber Data : | SP2D, Monitoring dan evaluasi, Laporan Kinerja (LKj) |
| Jenis Cascading IKU: | <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading |
| Metode Cascading : | <input checked="" type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect |
| Jenis Konsolidasi Periode : | <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value |
| Jenis Konsolidasi Lokasi : | <input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw data |
| Polarisasi Indikator Kinerja : | <input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize |
| Periode Pelaporan : | <input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan |

Tabel Data :

| Periode Pelaporan | 2017 | | 2018 | | 2019 |
|-------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| TAHUNAN | 95.00% | 99.64% | 100.00% | 95.96% | 100.00% |
| TRIWULAN I | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 10.78% | 25.00% |
| TRIWULAN II | 40.00% | 42.00% | 45.00% | 43.32% | 50.00% |
| TRIWULAN III | 70.00% | 72.00% | 70.00% | 69.68% | 80.00% |
| TRIWULAN IV | 95.00% | 99.64% | 100.00% | 95.96% | 100.00% |

LAMPIRAN II:

MATRIKS PROYEKSI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI
TAHUN 2019-2024

| Kode SS | Sasaran Strategis (SS) | Kode IKU | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2019 | Target 2020*) | Target 2021*) | Target 2022*) | Target 2023*) | Target 2024*) |
|--|---|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Stakeholder Perspective | | | | | | | | | |
| S1 | Penyelesaian hukum dan perjanjian Internasional di bidang ekonomi | S1.1 | Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Customer Perspective | | | | | | | | | |
| C1 | Terpenuhinya pelayanan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi | C1.1 | Persentase pelayanan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi sesuai dengan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Internal Business Process Perspective | | | | | | | | | |
| B1 | Diplomasi ekonomi yang kuat | B1.1 | Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang disampaikan dalam forum Internasional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | B1.2 | Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Learning and Growth Perspective | | | | | | | | | |
| L1 | Tata Kelola Organisasi yang baik di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | L1.1 | Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| L2 | Pengelolaan Anggaran yang Optimal di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | L2.1 | Persentase realisasi anggaran di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*) Proyeksi Target 2019-2024 diselaraskan sesuai dengan input Renja 2019

Format Lembar Penetapan Manual IKU

LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bersama ini ditetapkan manual IKU Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi untuk periode Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang meliputi:

- a. Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan;
- b. Persentase pelayanan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA);
- c. Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang disampaikan dalam forum Internasional;
- d. Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi;
- e. Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi;
- f. Persentase realisasi anggaran di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi.

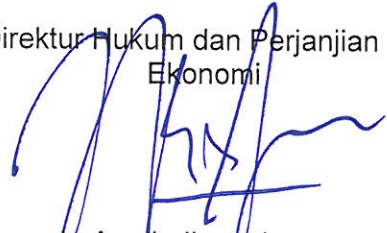
Jakarta, Januari 2019

SMKO

Direktur Hukum dan Perjanjian
Ekonomi



Mahmudin Nur Al-Gozaly
NIP. 19840212 200901 1 002



L. Amr'h Jinangkung
NIP. 19670618 199303 1 001

**MATRIKS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI
TAHUN 2019**

| ID SS | Sasaran Strategis | ID IKU | Indikator Kinerja Utama | Kinerja Tahun 2019 | | | | | Uraian Kegiatan | Indikator input/output | Satuan | Target | |
|-------|---|--------|--|--|----------------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Target/ Realisasi Tahunan | s/d TW/I | s/d TW/II | s/d TW/III | s/d TW/IV | | | | | |
| 1 | 2 | B2.1 | 4 | Persentase Pendapat Hukum di bidang Ekonomi yang Disampaikan dalam Forum Internasional | Target : 100 % | 25% | 50% | 75% | 100% | 10 | Perjanjian internasional yang diandatangani aman dari aspek politis, yuridis, teknis dan sekuriti sehingga kepentingan nasional dapat terlindungi | Kali | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Diplomasi Ekonomi yang Kuat | | | | | | | | | 11 | Input : Dana SDM Output : Perjanjian internasional yang diandatangani aman dari aspek politis, yuridis, teknis dan sekuriti sehingga kepentingan nasional dapat terlindungi | Rupiah Orang Kali | 754,444,000 6 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| L1 | Tata Kelola Organisasi yang baik di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | L1.1 | Nilai evaluasi AKIP di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | Target : BB (77) | | | | | BB (77) | 1 | Perundingan terkait Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang Perdagangan dan Investasi | Rupiah Orang Kali | 2,223,016,000 5 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |


**MATRIKS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT HUKUM DAN PERJANJIAN EKONOMI
TAHUN 2019**

| ID SS | Sasaran Strategis | ID IKU | Indikator Kinerja Utama | Kinerja Tahun 2019 | | | | | Rincian Kegiatan | | | |
|-------|--|--------|---|--------------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------------|--------|--------|
| | | | | Target/Realisasi Tahunan | s.d TW/I | s.d TW/II | s.d TW/III | s.d TW/IV | Uraian Kegiatan | Indikator Input/output | Satuan | Target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| L2 | Pengelolaan Anggaran yang Optimal di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi | L2.1 | Persentase realisasi anggaran di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi/Persentase dokumen rencana kinerja di Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Target : 100 % | 25% | 50% | 80% | 100% | | | | |

Jumlah Anggaran :
Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Ekonomi

Rp. 5,311,743,000

Jakarta, Januari 2019
Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi


L. AMRIH JINANGKUNG
NIP. 19670618 199303 1 001